

## AHY Kembali Temui Surya Paloh, Membicarakan soal Cawapres?

JAKARTA (IM) - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem telah beberapa kali bertemu Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun Paloh belum menentukan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan, di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Cawapres belum (diputuskan)," kata Paloh usai pertemuan sekitar 2 jam dengan AHY di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (26/10).

Menurut Paloh, semua nama masih sedang dinominasikan, masih diutak-atik dan dicari yang sesuai dengan bahasa, tanda-tanda dan kriteria yang diharapkan oleh Anies. "Sedang kita nominasikan, kita utak atik, kita cari, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Anies-nya seperti apa yang diharapkan beliau sebagai capres," kata Paloh.

Saat ditanya apakah AHY berpeluang duet dengan Anies di Pilpres 2024, menurut Paloh, bisa saja tapi soal cawapres ini sesuatu yang masih perlu dimatangkan.

"Bisa saja, tapi itulah barangkali yang masih perlu dimatangkan juga kan," jawabnya lugas.

Namun apakah AHY masuk kriteria, menurutnya, hanya Anies yang bisa menjawab. Dan pihaknya sudah menyerahkan soal cawapres itu kepada Anies. Yang pasti sebagai orang tua, dirinya akan merestui yang baik.

AHY menanggapi soal kesiapan menjadi cawapres. Ia mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan diri apapun tugas yang harus dijalankan pada saatnya.

Apapun dan di manapun itu harus siap, yang jelas sekarang ini pihaknya fokus dulu agar bagaimana Nasdem, Demokrat dan PKS bisa semakin menyatu dalam arti pikirannya dan pandangannya. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



### SIDANG TUNTUTAN KASUS PEN

Terdakwa Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (kedua kiri) bersama Terdakwa pengusaha dari Kabupaten Muna, L M Rusdianto Emba (kiri) berbincang dengan kuasa hukum usai mengikuti sidang tuntutan kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/10). JPU KPK menuntut mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dengan hukuman pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan dan mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Muna, Sukarman Loke dituntut hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan serta pengusaha dari Kabupaten Muna, L M Rusdianto Emba dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 subsider lima bulan kurungan karena diyakini mereka terlibat dalam kasus dugaan suap persetujuan dana PEN untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

## KSAD: Waspada terhadap Kelompok Radikalisme, Jangan Sampai Lengah

Dudung meminta setiap jajaran TNI AD di setiap daerah harus berkomitmen menjaga netralitas di tengah gempuran situasi politik.

JAKARTA (IM) - Prajurit TNI AD diminta agar terus waspada dalam menyikapi radikalisme yang kerap mengintai tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta para sesaat setelah menjadi Inspektur apel rutin di depan 3.451 Prajurit TNI AD, di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

"Saya tekankan juga untuk tetap waspada terhadap

kelompok-kelompok radikalisme. Kita antisipasi pergerakan mereka, jangan sampai kita lengah!" ujar Dudung di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

Menurutnya, kewaspadaan itu harus terjaga baik di tingkat atas maupun tingkat bawah TNI AD. Sehingga, lanjut Dudung, pihaknya tidak segan-segan mengatasi ancaman radikalisme tersebut.

"Terutama di pos-pos militer, termasuk di beberapa tempat yang perlu kita waspadi.

Sehingga TNI AD siap untuk mengantisipasi, bahkan untuk menanganinya," terangnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi inspektur apel kesiapsiagaan 3.451 Prajurit TNI AD di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Pada Rabu (26/10) pagi, usai menjadi inspektur Dudung turut berjalan mengamati tiap titik barikade pasukan yang tengah berjejer membentuk banisan.

### Jaga Netralitas

Dudung meminta setiap jajaran TNI AD di setiap daerah harus berkomitmen menjaga netralitas di tengah gempuran situasi politik.

"Baik oleh Kodam bekerjasama tentunya den-

gan pemerintah daerah tidak serta-merta panggung bekerja dan yang situasi politik dalam rangka menjalankan hubungan, nyatakan kembali kepada seluruh jajaran agar tetap Netral," tegasnya.

Setiap anggota TNI AD,

harus siaga menjelang pengaman G20 di Bali nanti.

"Tidak siapapun yang tidak mendukung siapapun dan kesiapan persiapan untuk menghadapi penting dalam rangka G20 ini pun harus kita siapkan," jelasnya. ● han

## Waduh, Banyak Mantan Pejabat di Jayapura Bawa Kabur Aset Pemkab

JAKARTA (IM) - Kejaksaaan Negeri Jayapura melakukan penarikan tujuh mobil aset daerah Kabupaten Mamberamo Raya, yang dibawa mantan pejabat lama untuk kepentingan pribadi.

Ketujuh mobil bermerk Toyota Hilux ini berhasil ditarik oleh Tim Kejari Jayapura atas surat kuasa Bupati Mamberamo Raya Joh Tabo dari beberapa wilayah di luar Kabupaten Mamberamo Raya, seperti di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan beberapa Kabupaten lain di Papua.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya mengatakan, selaku lembaga pemerintah sudah sepatutnya mendukung kebijakan kepala daerah seperti penertiban aset Kabupaten Mamberamo Raya. Dikatakan, sudah sepatutnya birokrasi harus tertib administrasi, aset dan keuangan.

"Kami mendukung penuh langkah Bapak Bupati Mamberamo Raya jadi kalau pencatatan asetnya tertib, maka belanja modalnya juga akan tertib. Karena status aset-aset ini manfaatnya tidak dirasakan oleh pemerintah Kabupaten. Sementara pembiayaannya ini dikeluarkan oleh APBD Kabupaten. Jadi ini juga menjadi contoh bagi Pemda yang lain," ucap Alex, Selasa (25/10).

Dijelaskan, mobil-mobil aset Pemda Kabupaten Mamberamo Raya ini berhasil dilacak dan ditarik dari wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, dengan nilai aset diperkirakan mencapai Rp2,4 miliar.

"Yang kami lokalisir baru dari Kota Jayapura, ada delapan unit sebetulnya, satu di Mamberamo Raya," terangnya.

Dikatakan, selain penarikan aset berupa mobil, pihaknya juga berhasil menarik uang dan barang berupa HP atas kerjasama yang belum teralisasi, yakni kerjasama dengan PT. Telkom bernama Smart City.

"Kalau uang tunai ini adalah hasil penyelidikan, ini temuan Intel atas proyek yang tidak jalan. Karena dari pihak Pemda

belum siap membangun infrastruktur untuk proyek itu. Jadi uang total yang kami tarik Rp570 juta lebih dengan 23 HP merek Iphone 12 Pro Max," ungkapnya.

"Jadi nilai total proyek ini adalah Rp5 miliar lebih, dan baru dicairkan sekitar Rp1 miliar lebih, itu proyek tahun 2018, dan karena tidak jalan jadi kita tarik. Tidak ada indikasi korupsi dalam kasus ini, maka kita kembalikan kepada Pemda," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mamberamo Raya, John Tabo mengapresiasi kerja cepat Kejari Jayapura. Dikatakan, penarikan aset tersebut menjadi pelajaran bagi semua khususnya pejabat.

"Dengan begini, orang akan memahami bahwa menggunakan aset daerah itu tidak sembarang, tidak sombong, tidak semaunya, karena ada aturan yang mengatur. Ini adalah aset daerah maka harus ada di Kabupaten Mamberamo Raya, bukan malah diluar Kabupaten dan dipakai ya tidak sesuai peruntukan. Ini akan menjadi inkubator atau contoh, supaya berhati-hati menggunakan aset daerah," tegasnya.

"Kami sangat berterimakasih kepada Kejari yang dalam waktu singkat, setelah teken kerjasama sekitar tiga bulan, tapi sudah berhasil menarik aset-aset ini," sambungnya.

Dikatakan lagi, pihaknya sebagai pembina Pamong di Kabupaten Mamberamo Raya akan berkomitmen untuk memberikan pendidikan berbirokrasi yang baik kepada masyarakat. Pihaknya mengaku selain mobil, aset yang masih tercecer adalah speedboat dan kendaraan roda dua. "Ini baru awal, dan kita akan terus kerjasama untuk menarik aset-aset ini. Supaya apa, menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat dan ASN. Kalau tidak digunakan sebagaimana aturan yang berlaku dan tidak sepatutnya maka akan kami tarik," tegasnya.

"Kita harus tegakkan aturan yang lurus, harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat," katanya. ● me



### PDI PERJUANGAN BERI SANKSI PADA FX HADI RUDYATMO

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menyaksikan Ketua DPP bidang Kehormatan Komarudin Watubun (kiri) memberikan surat sanksi kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (kanan) usai pertemuan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (26/10). Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir terhadap FX Hadi Rudyatmo terkait dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju Capres 2024.

## Bupati Nonaktif Kolaka Timur Dituntut Penjara Selama 4 Tahun

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur, 4 tahun penjara. Selain itu, Andi Merya juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan.

Jaksa KPK Asril meyakini Andi Merya Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Andi Merya diyakini telah menyuap sejumlah pihak Rp3,405 miliar terkait pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

"Menyatakan terdakwa H Andi Merya Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Asril saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa pidana penjara selama empat tahun

dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan," katanya.

Dalam melayangkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

Pertimbangan yang memberatkan tuntutan jaksa yakni karena perbuatan Andi Merya Nur tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sedangkan pertimbangan yang meringankan jaksa terhadap Andi Merya Nur yakni karena terdakwa dinilai berterus terang, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, serta bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Tak hanya Andi Merya, jaksa menuntut LM Rusdianto Emba yang merupakan adik kandung Bupati Muna, La Ode M Rusman Emba dituntut tiga tahun enam bulan (3,5 tahun) penjara serta denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Rusdianto Emba diyakini telah membantu Andi Merya menyuap sejumlah pihak. ● me

## Sandiaga Uno terbanyak Dipilih Jadi Capres di Gelaran Musra III

JAKARTA (IM) - Relawan Jokowi menggelar Musyawarah Rakyat ke III (Musra III) di Pekanbaru, Riau, untuk merekam nama-nama Capres dan Cawapres 2024 pilihan rakyat. Dalam hasil Musra III tersebut, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno, terpajang paling atas dalam perekaman nama pilihan masyarakat sebagai Capres dan Cawapres 2024.

Ketua Dewan Pengarah Musra, Andi Gani menjelaskan Sandiaga Uno mendapatkan presentasi terbanyak dalam Calon Presiden Harapan Rakyat dengan presentasi sebanyak 23,48 persen.

"Nomor satu, Sandiaga Uno dengan presentasi sebanyak 23,48 persen dari 624 suara," katanya saat jumpa pers Rabu (26/10).

Dalam posisi kedua, ada nama Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presentasi 19,51 persen. Disusul oleh Ganjar Pranowo pada posisi ketiga.

"Pada posisi ketiga ada nama Ganjar Pranowo dengan 19,09 persen. Cukup sengit ya," jelasnya.

Selain itu, nama Sandiaga Uno juga teratas dalam hasil Cawapres Harapan Rakyat Musra ke III. Hasil teratas tersebut didapat dari 629 jumlah perolehan suara.

"Cawapres harapan rakyat pertama, Sandiaga Uno diposisi pertama dengan nilai 23,68 persen," katanya.

Di posisi dua Cawapres pilihan rakyat ada nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dengan presentasi suara sebesar 18,52 persen. ● han

## Bakamla dan Turkish Coast Guard Perkuat Komitmen Kerjasama

JAKARTA (IM) - Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, untuk kali kedua bertemu RADM Ahmet Kendir, Commandant of Turkish Coast Guard (TCG) di ruang pertemuan khusus di Pameran Akbar SAHA Expo di Istanbul Turki, Rabu (26/10).

Laksdya TNI Aan Kurnia dalam pembukaannya menegaskan kembali komitmen Bakamla untuk menguatkan kerjasama dengan TCG.

"Pertemuan kali kedua ini setelah pertemuan pertama pada tahun 2021 lalu, merupakan wujud nyata komitmen saya untuk membina hubungan ekstra regional," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (26/10).

"Indonesia dan Turki memiliki situasi maritim yang identik karena sama-sama memiliki choke point strategis dunia, yaitu Selat Bosphorus dan Selat Malaka. Kerjasama dalam bentuk pertukaran in-

formasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, tentu akan meningkatkan kapasitas kedua lembaga berwenang di laut," tutur Laksdya TNI Aan Kurnia.

Sementara itu, RADM Ahmet Kendir mengamini apa yang disampaikan Kepala Bakamla RI. Ia menyampaikan, TCG akan bekerja serius menyiapkan rencana-rencana kerjasama ke depan.

Tahun depan TCG akan menjadi penyelenggara HACGAM 2023 di Istanbul. Bakamla dipantikan menjadi perwakilan tunggal dari Indonesia dalam perhelatan itu.

"Pada HACGAM 2023 kita akan melaksanakan Working Group Exercise tentang Hukum Laut," jelas RADM Ahmet Kendir.

Selain peningkatan kapasitas melalui pertukaran perwira antar kedua lembaga, dilakukan juga penguatan komitmen pertukaran informasi. Bakamla

memiliki IMIC dan menawarkan kepada TCG untuk memberikan dukungan informasi terkait kapal-kapal berbandera Turki yang melintasi perairan dan yurisdiksi Indonesia. Tawaran ini mendapat sambutan sangat baik dari RADM Ahmet Kendir. Ia mengapresiasi dan menyatakan hal ini akan sangat membantu tugas-tugas TCG.

Pertemuan kedua kepala lembaga ini dilaksanakan saat kunjungan ke SAHA Expo 2022 di Istanbul Turki yang berlangsung dari 25-28 Oktober 2022. SAHA Expo adalah pameran alat dan sistem pertahanan yang diselenggarakan oleh SAHA Istanbul Defence, Aviation and Space Association, sebuah asosiasi terbesar di Turki dan Uni Eropa. Kesempatan ini sangat penting bagi Bakamla untuk dapat melihat kebutuhan-kebutuhan potensial sarana prasarana penegakan hukumnya di masa mendatang. ● han



### SIDANG PUTUSAN SELA PUTRI CANDRAWATHI

Terdakwa Putri Candrawathi mengenakan rompi tahanan usai menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (26/10). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi terdakwa Putri Candrawathi.

PENGUMUMAN  
Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 UU No.40 Thn. 2007, PT MANUNGKAL POWER UTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), mengumumkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, No. 13 tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah memutuskan penurunan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 87.871.000.000,- menjadi sebesar Rp. 87.671.000.000,-. Jika ada keberatan mengenai hal-hal tersebut di atas, mohon agar mengajukan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 60 hari kalender terhitung sejak tanggal Pengumuman ini dan diajukan kepada:  
Direksi Perseroan  
Rukan Permana Senayan Blok B 03- 05.  
Jalan Tentara Pelajar, Kel Grogol, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq. Direktur Perdata Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. H. R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta 12940.  
Jakarta, 27 Oktober 2022  
DIREKSI